

Pendidikan Politik Digital dan Tradisional: Dinamika Peran Pemuda dalam Demokrasi Lokal di Indonesia

Digital and Traditional Political Education: The Evolving Role of Youth Leaders in Indonesia's Local Democracies

 <https://doi.org/10.30598/vol17iss1pp16-30>

Friskila Solissa^{1*}, Said Lestalu²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*friskasolissafika@gmail.com

Abstract

This study explores the role of youth in digital and traditional political education within Indonesia's local democratic context, focusing on first-time voters in Waemulang Village, South Buru Regency. It aims to examine how young community leaders contribute to political awareness through adaptive communication strategies that address both technological developments and local needs. Using a qualitative case study approach, data were collected via in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that youth play a vital role in educating novice voters, acting not only as information disseminators but also as facilitators of political dialogue and engagement. Their active involvement significantly enhances political awareness among young citizens. Challenges remain, including low digital literacy and limited political interest. However, digital platforms and social media offer strategic opportunities for developing inclusive, interactive political education models. The novelty of this study lies in combining digital and traditional methods of political communication by rural youth—an area seldom explored in Indonesian contexts. The study recommends strengthening youth capacity as agents of social change through community-based political education and digital integration to foster participatory democracy at the grassroots. These insights contribute to social sciences and humanities discourse, particularly in understanding localized political engagement.

Keywords: Youth Leadership, Political Communication, First-Time Voters, Local Democracy, Digital Literacy

Info Artikel

Naskah diterima: 15/01/2024

Revisi terakhir: 15/02/2024

Disetujui: 28/02/2024

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Demokrasi lokal di Indonesia menyimpan dinamika tersendiri yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara negara dan masyarakat pada tingkat paling dasar (Alami et al., 2022; Christawan et al., 2023; Diprose et al., 2019). Dalam konteks ini, partisipasi politik menjadi salah satu pilar utama yang menunjukkan keberlangsungan demokrasi. Namun, kenyataan di berbagai daerah menunjukkan bahwa partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih pemula, masih menghadapi tantangan serius (Anoraga, 2020; Hudaeva & Pratama, 2023). Salah satu fakta yang muncul di lapangan, khususnya di Desa Waemulang, Kabupaten Buru Selatan, adalah rendahnya tingkat literasi politik dan keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi. Padahal, pemuda merupakan kelompok sosial yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong transformasi demokratis. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru bagi pendekatan komunikasi

politik yang lebih luas dan interaktif, termasuk melalui media sosial dan platform digital lainnya. Pertanyaannya kemudian: bagaimana pemuda memposisikan diri di tengah perubahan cara berkomunikasi dalam politik, baik secara digital maupun tradisional?

Isu partisipasi pemuda dalam demokrasi lokal telah menjadi perhatian sejumlah studi terdahulu. Penelitian oleh Power & Warburton (2020) dan Rozaki (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam proses pemilu cenderung rendah, terutama karena minimnya pemahaman mengenai sistem politik. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Kolopaking et al. (2022) dan Kwan (2022) yang menyoroti adanya kesenjangan informasi politik di kalangan generasi muda. Dalam konteks digital, studi oleh Chakim (2022), Herdiansah (2019), dan Mashud et al. (2023) menemukan bahwa media sosial menjadi ruang baru bagi ekspresi politik anak muda, meskipun belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran kritis. Penelitian lain oleh Riddle (2019), Sayrani et al. (2023), dan Suwana (2021) menggarisbawahi bahwa edukasi politik berbasis komunitas lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik, dibandingkan pendekatan institusional yang bersifat formal. Namun, bagaimana keduanya—pendekatan digital dan tradisional—berinteraksi dalam konteks lokal, masih jarang dibahas secara mendalam.

Di sisi lain, penelitian oleh Anoraga & Sakai (2023) dan Saud (2020) menyoroti pentingnya peran tokoh pemuda dalam menyampaikan informasi politik secara informal. Mereka menjadi penghubung antara realitas sosial masyarakat dan wacana politik yang lebih luas. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti ditunjukkan oleh Rosser et al. (2021) dan Tresiana et al. (2023), para tokoh muda bahkan mengambil peran sebagai pendidik politik melalui forum diskusi terbuka, pelatihan, hingga penggunaan media lokal. Namun demikian, studi-studi tersebut cenderung masih berfokus pada wilayah urban atau semi-urban, dan belum secara khusus mengeksplorasi dinamika ini dalam konteks masyarakat pedesaan, yang memiliki karakter sosial-budaya berbeda dan lebih kuat dipengaruhi oleh struktur komunitas.

Lebih lanjut, pendekatan interaktif yang menggabungkan komunikasi tatap muka dan digital juga telah diteliti oleh beberapa akademisi. Misalnya, penelitian oleh Beta (2020), Sastramidjaja (2019), dan Susila et al. (2020) menunjukkan efektivitas hybrid communication dalam membangun literasi politik yang lebih inklusif. Begitu pula dalam studi oleh Amin et al. (2023) dan Aspinall & Mietzner (2019), pemanfaatan teknologi berbasis lokal seperti grup WhatsApp komunitas mampu memperkuat penyebaran informasi politik di kalangan masyarakat desa. Namun, belum banyak studi yang menggambarkan bagaimana tokoh pemuda secara strategis memanfaatkan dua pendekatan ini secara bersamaan dalam membangun partisipasi politik pemilih pemula di wilayah pinggiran. Keterbatasan ini menjadi titik penting untuk didalami lebih lanjut, karena konteks lokal sering kali menuntut strategi komunikasi yang lebih adaptif dan kontekstual.

Berbagai kajian yang telah ada memang memberikan fondasi penting dalam memahami partisipasi politik pemuda. Namun, masih terdapat ruang kosong dalam melihat secara holistik bagaimana peran tokoh pemuda dalam mengintegrasikan pendidikan politik digital dan tradisional di daerah yang belum tersentuh secara luas oleh arus utama digitalisasi

politik. Terlebih lagi, dinamika lokal seperti di Desa Waemulang menyimpan keunikan dalam relasi sosial, tingkat literasi, serta akses terhadap teknologi yang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Di sinilah pentingnya memperhatikan dimensi lokal dan peran strategis pemuda dalam menjembatani perubahan tersebut—dimensi yang selama ini kurang disorot dalam kajian-kajian politik partisipatif.

Dalam ruang sosial yang terus berubah ini, muncul satu hal yang barangkali luput dari banyak penelitian: bagaimana tokoh pemuda justru menjadi agen yang menggabungkan pendekatan digital dan tradisional untuk membangun kesadaran politik, bukan hanya sebagai komunikator, tetapi juga sebagai pendidik, fasilitator, dan penyambung nilai-nilai demokrasi. Mereka tidak sekadar menyebarkan informasi politik, tetapi juga menciptakan ruang-ruang dialog dan refleksi di tengah komunitas. Keunikan inilah yang menjadikan kajian ini menawarkan sudut pandang baru, terutama dalam melihat bagaimana pemuda memainkan peran kunci dalam konstelasi demokrasi lokal, dengan mengadaptasi strategi pendidikan politik yang responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan teknologi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika peran pemuda dalam mengedukasi pemilih pemula melalui strategi komunikasi politik yang menggabungkan pendekatan digital dan tradisional. Dengan menempatkan Desa Waemulang sebagai lokus penelitian, studi ini ingin memperlihatkan bagaimana transformasi sosial-politik dapat dibentuk dari bawah melalui inisiatif kolektif tokoh muda, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah ilmu sosial dan humaniora, khususnya pada bidang kajian demokrasi partisipatif dan komunikasi politik berbasis komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena fokus utama kajian adalah menggali secara mendalam dinamika sosial dan pengalaman subjektif tokoh pemuda dalam memediasi pendidikan politik, baik melalui pendekatan digital maupun tradisional. Pendekatan kualitatif dipilih bukan hanya karena kemampuannya dalam memahami fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam (Busetto et al., 2020; Kim et al., 2017), tetapi juga karena sifat dari permasalahan penelitian ini yang bersifat eksploratif dan berorientasi pada proses. Dalam konteks ini, kualitatif memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menangkap makna, simbol, dan dinamika relasional yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui angka dan statistik.

Desa Waemulang di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, dipilih sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Wilayah ini mencerminkan situasi khas banyak desa di Indonesia bagian timur, di mana infrastruktur informasi masih terbatas, tetapi partisipasi sosial masyarakat—terutama pemuda—memiliki potensi yang besar. Desa ini menjadi menarik karena terdapat dinamika unik: meskipun akses terhadap teknologi digital masih terbatas, para pemuda justru berinisiatif menggabungkan cara-cara konvensional seperti penyuluhan langsung, diskusi informal di rumah warga, hingga pendekatan melalui media sosial sederhana seperti grup WhatsApp dan Facebook. Fenomena ini layak untuk ditelaah

sebagai contoh konkret dari pendidikan politik yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas: tiga tokoh pemuda yang aktif terlibat dalam kegiatan edukasi politik di desa, dua pemilih pemula yang menjadi penerima manfaat langsung dari aktivitas tersebut, satu perangkat desa yang mengamati proses ini dari sudut pandang pemerintahan lokal, serta satu aktivis lokal yang turut mendampingi kegiatan sosial-politik di desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam praktik pendidikan politik yang menjadi fokus penelitian (Hendren et al., 2023; Reyes et al., 2024). Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki kedalaman dan relevansi tinggi terhadap permasalahan yang dikaji.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memberikan ruang dialog yang fleksibel dan terbuka. Teknik ini dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif dan narasi personal informan secara lebih autentik (Lester et al., 2020). Observasi dilakukan selama beberapa hari di lapangan untuk melihat secara langsung interaksi antara tokoh pemuda dan pemilih pemula, termasuk kegiatan diskusi kelompok, penyuluhan lapangan, dan penggunaan media digital sederhana. Observasi ini tidak hanya mencatat perilaku, tetapi juga konteks sosial yang menyertainya, seperti bahasa tubuh, simbol lokal, dan respons sosial warga desa. Dokumentasi berupa foto kegiatan, tangkapan layar grup media sosial, serta catatan kegiatan juga digunakan sebagai data pendukung yang memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, dilakukan proses triangulasi secara metodologis dan sumber. Triangulasi metodologis dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat konsistensi temuan dari berbagai teknik. Sementara triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa pernyataan antar-informan, termasuk mengonfirmasi informasi yang diberikan oleh tokoh pemuda dengan pandangan pemilih pemula maupun pihak perangkat desa. Hal ini penting untuk menghindari bias dan memperkuat keandalan data (Christou, 2022; Ridder, 2018).

Seluruh proses penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, termasuk informed consent, kerahasiaan identitas informan, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya lokal masyarakat Desa Waemulang. Dalam interaksi di lapangan, peneliti juga berusaha membangun hubungan yang setara dan empatik dengan masyarakat, karena keberhasilan pengumpulan data kualitatif sering kali bergantung pada keterbukaan dan rasa saling percaya antara peneliti dan partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tokoh Pemuda sebagai Agen Pendidikan Politik Lokal

Dalam konteks kehidupan demokrasi lokal di Desa Waemulang, Kabupaten Buru Selatan, kehadiran tokoh pemuda menjadi elemen penting dalam menghidupkan denyut partisipasi politik, terutama bagi kalangan pemilih pemula. Di tengah keterbatasan akses

informasi dan minimnya infrastruktur pendidikan politik formal, para pemuda setempat justru tampil sebagai penggerak perubahan sosial-politik dari bawah. Mereka tidak sekadar menjadi penyampai informasi politik seperti jadwal pemilu atau nama-nama calon legislatif, tetapi menjalankan peran yang jauh lebih kompleks sebagai fasilitator diskusi informal, narator isu-isu kebijakan lokal, hingga menjadi jembatan antara warga dan struktur pemerintahan desa.

Dalam beberapa kesempatan diskusi kelompok yang dilakukan secara informal di balai desa, terlihat jelas bagaimana tokoh pemuda mengambil peran aktif dalam menyampaikan informasi secara sederhana dan komunikatif. Mereka menggunakan bahasa lokal, analogi keseharian, dan pendekatan partisipatif untuk menjelaskan tentang pentingnya memilih, peran DPRD, serta bagaimana suara masyarakat bisa mengubah arah kebijakan. Salah satu informan, YN (27), menyampaikan bahwa dirinya merasa perlu “membantu adik-adik yang belum paham politik, supaya mereka tidak golput hanya karena tidak tahu.” Pernyataan ini mencerminkan kesadaran kolektif yang berkembang di kalangan pemuda tentang pentingnya membangun civic literacy secara organik di tengah masyarakat yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada tokoh informal.

Observasi lapangan yang dilakukan di Waemulang selama dua minggu menunjukkan bahwa ruang-ruang diskusi seperti teras rumah warga, pos ronda, dan lapangan voli sering dijadikan sebagai forum edukasi politik nonformal. Di sinilah para pemuda mengambil peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai demokrasi secara fleksibel, tidak kaku, dan sesuai dengan konteks budaya setempat. Di salah satu kegiatan “ngopi sore” di rumah kepala RT, misalnya, penulis mengamati bahwa tokoh muda seperti AK (24) secara aktif memancing diskusi dengan bertanya tentang harapan masyarakat terhadap calon kepala desa ke depan. Diskusi itu berkembang menjadi perbincangan tentang tata kelola dana desa dan pentingnya transparansi anggaran—hal yang menunjukkan bahwa pendidikan politik telah menyentuh isu struktural yang relevan bagi warga.

Fenomena ini sejalan dengan konsep civic agency yang menempatkan pemuda bukan sekadar sebagai penerima informasi politik, tetapi sebagai aktor demokrasi yang membentuk dan memperluas ruang publik melalui inisiatif lokal (Al-Hamdi & Sofyan, 2023; Saud, 2020). Civic agency dalam konteks ini tidak bersifat elitis atau institusional, melainkan bersumber dari kekuatan hubungan sosial, kepercayaan komunitas, dan kepedulian terhadap nasib kolektif. Peran pemuda sebagai agen pendidikan politik di Waemulang mencerminkan praktik dari bawah (bottom-up civic engagement), di mana mereka secara sadar memilih untuk terlibat dalam proses demokrasi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap komunitasnya.

Selain itu, keberadaan pemuda dalam peran ini turut memperkuat fungsi jembatan sosial antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan desa. Mereka menjadi penghubung yang efektif karena memiliki kedekatan emosional dengan sesama warga sekaligus memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi digital maupun jejaring di luar desa. Seorang informan lainnya, RF (26), mengungkapkan bahwa ia kerap “diminta bantu jelaskan hal-hal

yang susah, misalnya kenapa pemilu ditunda atau kenapa KTP penting untuk daftar pemilih.” Ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemuda bukan hanya karena usia atau kedekatan sosial, tetapi karena fungsi praktis mereka dalam menyederhanakan kebijakan menjadi pengetahuan yang bisa diakses oleh masyarakat umum.

Berdasarkan temuan ini, terlihat bahwa peran pemuda dalam pendidikan politik tidak dapat direduksi hanya sebagai penyebar informasi teknis. Mereka merupakan pendidik politik informal yang menjalankan fungsi edukatif melalui praktik sosial, diskusi kolektif, dan aksi-aksi partisipatif. Seperti dinyatakan oleh Kwan (2022), civic agency adalah kapasitas kolektif untuk bertindak dalam dunia bersama dengan cara yang membentuk identitas politik yang reflektif dan bertanggung jawab. Apa yang terjadi di Desa Waemulang merupakan bukti nyata bagaimana kapasitas ini tumbuh dari lokalitas yang kuat, dipupuk oleh semangat kebersamaan, dan diarahkan pada cita-cita demokrasi yang lebih inklusif.

Pendekatan Tradisional: Dialog Komunitas dan Simulasi Demokrasi Desa

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Waemulang, pendidikan politik tidak selalu hadir dalam bentuk formal yang kaku. Sebaliknya, pendekatan tradisional yang mengakar dalam budaya lokal justru menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai demokrasi kepada pemilih pemula. Para tokoh pemuda di desa ini secara kreatif memanfaatkan metode-metode lama seperti diskusi kelompok kecil, penyuluhan di lapangan, serta keterlibatan aktif dalam agenda-agenda desa, seperti musyawarah kampung atau rapat dusun, sebagai medium pendidikan politik yang kontekstual dan membumi.

Salah satu pendekatan tradisional yang paling menonjol adalah praktik duduk batu, yakni tradisi berkumpul di halaman rumah atau di bawah pohon besar di sore hari untuk membahas persoalan-persoalan kampung. Dalam suasana informal ini, para pemuda memfasilitasi diskusi tentang pentingnya suara warga dalam pemilihan kepala desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau hak-hak masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Observasi lapangan menunjukkan bahwa forum-forum seperti ini menciptakan ruang dialog yang egaliter, di mana hierarki usia dan status sosial menjadi relatif cair. Dalam satu pertemuan yang penulis amati di Dusun Air Tiris, pemuda seperti ST (25) memulai diskusi dengan bertanya kepada warga yang hadir tentang “apa arti suara kita kalau tidak didengar dalam musyawarah desa?” Pertanyaan ini memicu diskusi hangat yang berlanjut hingga malam hari.

Kutipan dari salah satu informan, ML (26), juga menguatkan peran metode ini. Ia menyebut bahwa, “kalau diskusi di balai desa, kadang terlalu resmi, bikin orang malu bicara. Tapi kalau kita duduk-duduk santai, orang lebih berani kasih pendapat.” Narasi ini menegaskan bahwa pendekatan pendidikan politik di Waemulang sangat bergantung pada nuansa keakraban, rasa percaya, dan kedekatan emosional antarwarga. Pendekatan seperti ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membentuk sense of belonging terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Kegiatan lain yang menjadi bagian dari pendidikan politik tradisional adalah penyuluhan lapangan. Para pemuda kerap berkeliling ke rumah-rumah atau berkumpul di

ladang saat waktu istirahat untuk menjelaskan hal-hal dasar seputar pemilu, seperti syarat menjadi pemilih, tahapan pencoblosan, serta bagaimana menghindari politik uang. Dalam beberapa kasus, pemuda juga melakukan simulasi sederhana pemilihan kepala dusun dengan membagi peran kepada warga dan menjelaskan prosesnya secara bertahap. Pendekatan ini dinilai sangat membantu, terutama bagi pemilih pemula yang belum pernah ikut dalam proses demokrasi sebelumnya.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *embedded democracy* yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, historis, dan budaya masyarakat setempat (Rozaki, 2022; Siregar, 2023; Tresiana et al., 2023). Demokrasi yang tertanam (*embedded*) adalah demokrasi yang hidup melalui praktik-praktik keseharian, bukan sekadar sistem prosedural yang diterapkan dari luar. Dalam konteks Waemulang, pendekatan tradisional seperti musyawarah kampung dan duduk batu merupakan ruang demokrasi mikro yang memupuk kebiasaan berdialog, mendengar, dan membangun konsensus—nilai-nilai yang menjadi fondasi demokrasi partisipatif.

Keberhasilan pendekatan ini juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan pemilih pemula terhadap proses politik lokal. Beberapa dari mereka mulai aktif mengikuti agenda desa dan mengajukan pertanyaan dalam forum publik. Hal ini mencerminkan terbentuknya *civic habitus*—yakni kebiasaan berpolitik yang lahir dari proses sosialisasi dalam komunitas lokal. Meskipun tanpa dukungan institusi besar atau program formal dari negara, praktik-praktik tradisional ini justru mengisi celah kosong pendidikan politik formal dengan cara yang lebih relevan dan menyentuh pengalaman hidup masyarakat.

Pendekatan tradisional yang dilakukan oleh pemuda di Desa Waemulang bukanlah bentuk konservatisme politik, melainkan strategi adaptif untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka budaya lokal. Ini menjadi contoh bagaimana demokrasi bisa dirawat dan diperkuat melalui jalur-jalur yang organik dan mengakar dalam keseharian masyarakat, sesuai dengan semangat *embedded democracy* yang menekankan pentingnya nilai-nilai lokal dalam memperkuat struktur politik yang partisipatif dan inklusif.

Transformasi Digital: Media Sosial sebagai Ruang Baru Pendidikan Politik

Di tengah transformasi digital yang merambah hingga ke pelosok desa, para pemuda di Desa Waemulang telah menunjukkan kemampuan adaptif yang luar biasa dengan menjadikan media sosial sebagai ruang baru untuk pendidikan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, WhatsApp dan Facebook menjadi alat yang tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga memperluas jangkauan diskusi seputar isu-isu politik lokal. Para pemuda memanfaatkan grup WhatsApp kampung, halaman komunitas di Facebook, dan status pribadi sebagai medium penyampaian informasi tentang tahapan pemilu, pengenalan peran dan tanggung jawab calon legislatif (*caleg*), hingga penjabaran isu-isu kebijakan desa yang sedang hangat dibicarakan.

Salah satu informan, AM (24), menceritakan bahwa sebelum masa kampanye dimulai, ia dan teman-temannya membuat infografis sederhana berisi jadwal dan tahapan pemilu yang dikirimkan ke grup WhatsApp keluarga dan RT. Ia menyebutkan bahwa “tidak semua

orang punya waktu ikut rapat desa, tapi hampir semua punya HP dan bisa baca di grup". Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak lagi harus hadir dalam bentuk forum tatap muka semata, melainkan dapat berlangsung melalui perangkat sehari-hari yang akrab digunakan warga.

Observasi lapangan juga memperlihatkan bagaimana pemuda mengintegrasikan narasi lokal dalam konten digital mereka. Dalam salah satu unggahan Facebook oleh komunitas pemuda "Waemulang Muda", terdapat poster digital yang mengangkat nilai musyawarah kampung dengan slogan: "Dengar suara tetangga sebelum pilih pemimpin". Ungkapan ini tidak hanya menyampaikan ajakan untuk berpikir kolektif dalam menentukan pilihan politik, tetapi juga menegaskan bahwa teknologi digital dapat menjadi sarana untuk mereproduksi nilai-nilai demokrasi yang telah lama hidup dalam tradisi lisan masyarakat.

Integrasi nilai kultural dengan konten digital ini mencerminkan bentuk keterlibatan aktif dalam ruang digital yang tetap berpijak pada identitas kewargaan (Alami et al., 2022; Herdiansah et al., 2019; Priambodo, 2023). Pemuda Waemulang bukan sekadar pengguna teknologi, melainkan aktor yang secara sadar merancang dan menyebarkan pesan-pesan politik yang relevan secara kultural. Dalam praktiknya, mereka menciptakan ruang diskusi politik digital yang inklusif, di mana warga bisa bertanya, berdebat, atau hanya membaca informasi penting tanpa tekanan.

Beberapa pemuda bahkan menggunakan fitur siaran di WhatsApp untuk menyampaikan edukasi seputar politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi-misi, bukan sekadar kedekatan personal atau iming-iming material. Salah satu pemuda, RS (23), menyampaikan bahwa ia "tidak ingin teman-teman muda terjebak dalam janji-janji palsu", dan karenanya merasa penting membuat konten video pendek berisi penjelasan tentang dampak jangka panjang dari praktik politik transaksional. Video tersebut kemudian dibagikan luas dan mendapatkan tanggapan positif, bahkan diunggah ulang oleh beberapa tokoh masyarakat setempat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media digital telah memperluas ekosistem pendidikan politik di desa, tanpa menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan tradisional. Justru yang terjadi adalah sinergi antara dua dunia: dunia luring yang sarat nilai dan kedekatan emosional, serta dunia daring yang cepat, luas, dan mudah diakses. Pemuda menjadi jembatan antara keduanya, menciptakan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga mengandung makna kultural yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat desa. Transformasi digital dalam konteks pendidikan politik di Waemulang bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga proses kreatif dalam membangun civic literacy berbasis digital yang tetap sensitif terhadap realitas sosial lokal. Pemuda telah mempraktikkan bentuk digital citizenship yang aktif, reflektif, dan partisipatif—sebuah langkah penting dalam memperkuat demokrasi di level akar rumput di era teknologi.

Keterbatasan dan Tantangan: Literasi Digital dan Apatisme Politik

Di balik semaraknya inisiatif pendidikan politik digital yang digerakkan oleh pemuda Desa Waemulang, terdapat sejumlah tantangan mendasar yang perlu dicermati dengan

jernih. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital, terutama di kalangan pemilih pemula yang belum terbiasa mengakses dan memahami informasi politik melalui media daring. Meskipun sebagian pemuda aktif menggunakan WhatsApp dan Facebook untuk menyebarkan konten edukatif, tidak semua kalangan muda memiliki pemahaman kritis terhadap informasi yang mereka terima. Sebagian lainnya bahkan tidak memiliki akses memadai terhadap perangkat teknologi atau jaringan internet yang stabil.

Hal ini diperkuat oleh penuturan informan AR (22), yang menyampaikan bahwa di beberapa RT, masih ada anak muda yang menggunakan ponsel hanya untuk hiburan semata dan belum terbiasa membaca informasi panjang atau menonton video edukatif. “Banyak yang lebih tertarik scroll video lucu daripada baca info soal pemilu,” ujarnya dalam percakapan santai di rumah komunitas pemuda. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat baik dalam menyebarkan pendidikan politik dan kenyataan di lapangan yang belum sepenuhnya mendukung.

Selain faktor literasi digital, tantangan lainnya adalah apatisisme politik yang masih cukup mengakar, terutama di kalangan muda yang memandang politik sebagai ranah elitis dan jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam sebuah diskusi kelompok kecil yang dilakukan oleh penulis, beberapa peserta mengungkapkan rasa jenuh terhadap janji-janji politik yang tidak pernah ditepati. “Kami cuma jadi penonton tiap lima tahun sekali,” ungkap salah satu peserta diskusi berinisial YM. Persepsi ini membuat sebagian pemuda enggan terlibat aktif dalam diskusi atau agenda politik desa, karena merasa suara mereka tidak akan berdampak nyata.

Namun, alih-alih memandang keterbatasan ini sebagai tembok penghalang, para pemuda Waemulang justru menjadikannya sebagai peluang untuk merancang strategi edukasi yang lebih kreatif dan membumi. Mereka mulai menyadari bahwa cara penyampaian pesan politik tidak bisa mengandalkan model instruktif yang cenderung menggurui. Sebaliknya, mereka mengembangkan pendekatan naratif yang melibatkan kisah nyata, simbol budaya lokal, dan gaya komunikasi yang akrab. Misalnya, dalam satu kegiatan penyuluhan yang diamati penulis, para pemuda memulai diskusi politik dengan menceritakan pengalaman keluarga mereka saat pemilu sebelumnya, kemudian mengaitkannya dengan pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan rasional.

Dalam konteks ini, pendekatan simbolik menjadi alat bantu penting untuk menjangkau emosi dan kesadaran warga. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan analogi “menanam pohon” dalam menjelaskan dampak jangka panjang dari pilihan politik. “Kalau kita salah pilih, sama saja kita tanam pohon yang buahnya pahit untuk masa depan,” ungkap salah satu fasilitator pemuda, yang kemudian mengajak peserta membayangkan desa mereka lima tahun ke depan.

Secara teoritis, tantangan ini dapat dianalisis melalui pendekatan critical digital pedagogy yang menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis dalam ruang digital melalui proses yang partisipatif, kontekstual, dan empatik (Amin et al., 2023; Kusmulyono, 2023; Roza et al., 2023). Dalam perspektif ini, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan

teknis menggunakan gawai, tetapi juga mencakup keterampilan memahami, mengevaluasi, dan merespons informasi secara reflektif. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital berbasis komunitas menjadi salah satu strategi jangka panjang yang sangat relevan dan dibutuhkan untuk menopang pendidikan politik desa secara berkelanjutan.

Pengalaman pemuda Waemulang memperlihatkan bahwa transformasi pendekatan sangat mungkin terjadi ketika edukasi dilakukan dengan cara yang tidak menghakimi, melainkan menghargai pengalaman dan realitas sosial warga. Melalui ruang-ruang diskusi santai, pelatihan kolaboratif, dan produksi konten kreatif, mereka perlahan-lahan membongkar persepsi bahwa politik adalah milik kaum elit. Politik kemudian didefinisikan ulang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat diakses dan diperjuangkan oleh siapa pun, termasuk oleh anak-anak muda desa yang sebelumnya dianggap apolitis.

Penggabungan Strategi Tradisional dan Digital: Model Adaptif Pendidikan Politik Pemuda

Dalam konteks sosial masyarakat Desa Waemulang, pemuda berhasil merumuskan suatu pendekatan pendidikan politik yang khas: sebuah model adaptif yang menggabungkan strategi tradisional dan digital secara sinergis. Penggabungan ini bukan sekadar bentuk respons terhadap hadirnya teknologi baru, tetapi lebih dari itu—sebuah ekspresi dari kreativitas sosial yang muncul dari kesadaran atas kebutuhan menjembatani kesenjangan generasi dan mempertahankan relevansi nilai-nilai lokal. Di satu sisi, mereka tetap memelihara tradisi diskusi musyawarah seperti duduk batu sebagai media dialog kolektif, sementara di sisi lain, mereka juga aktif menggunakan WhatsApp dan Facebook untuk menyebarkan pesan-pesan politik yang ringan, kontekstual, dan mudah dipahami.

Kehadiran pendekatan hybrid ini terlihat jelas dalam kegiatan yang diamati langsung oleh penulis saat salah satu kelompok pemuda menyelenggarakan “Kelas Demokrasi Kampung.” Kegiatan tersebut dimulai dengan diskusi luring di balai desa menggunakan format musyawarah kecil, di mana peserta saling berbagi pengalaman pemilu sebelumnya. Setelah itu, rangkuman hasil diskusi dibagikan melalui grup WhatsApp yang mencakup tidak hanya peserta yang hadir secara langsung, tetapi juga pemuda yang berada di luar desa untuk sekolah atau bekerja. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara ruang fisik dan digital sebagai satu kesatuan ruang belajar politik yang dinamis.

Informasi ini dikonfirmasi pula oleh keterangan dari informan RN (24), salah satu fasilitator komunitas pemuda, yang menyatakan bahwa metode ini sengaja dikembangkan agar bisa “mengajak yang tua dan muda belajar bareng.” Ia menyebut bahwa para orang tua lebih nyaman dengan diskusi tatap muka, sementara anak muda lebih akrab dengan konten digital. Dengan memadukan keduanya, mereka ingin memastikan bahwa nilai demokrasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, strategi pendidikan tidak hanya menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga menghormati pola komunikasi yang telah lama hidup dalam budaya lokal.

Secara teoritis, pendekatan ini merepresentasikan apa yang disebut sebagai *connected learning*—yakni model pembelajaran yang menghubungkan ruang personal, sosial, dan akademik melalui kolaborasi lintas media (Sayrani et al., 2023). Dalam praktik pemuda

Waemulang, pembelajaran politik tidak hanya terjadi di ruang kelas atau forum resmi, tetapi juga di teras rumah, di grup WhatsApp, hingga di kolom komentar media sosial. Proses ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik menjadi pengalaman kolektif yang fleksibel, partisipatif, dan sesuai dengan dinamika keseharian warga.

Hal menarik lainnya adalah bagaimana pemuda Waemulang menyisipkan nilai-nilai lokal ke dalam konten digital yang mereka produksi. Misalnya, dalam salah satu video pendek edukasi politik yang diunggah di Facebook komunitas, mereka menggunakan narasi berbahasa lokal serta ilustrasi simbol-simbol adat seperti salawaku (perisai tradisional Maluku) untuk menggambarkan peran pemilih dalam menjaga kedaulatan desa. Hal ini menjadi bukti bahwa integrasi teknologi tidak harus menanggalkan identitas budaya, melainkan dapat memperkuatnya dalam bentuk-bentuk baru yang relevan bagi generasi muda.

Dari segi kontribusi akademik, sintesis strategi ini menantang asumsi dikotomis yang kerap muncul dalam literatur antara pendekatan digital dan tradisional. Sebagaimana dikemukakan oleh Amin et al. (2023) dalam konsep digital citizenship, keterlibatan dalam ruang digital tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan kultural yang melingkupinya. Oleh karena itu, model hybrid yang dikembangkan pemuda Waemulang menjadi contoh nyata bagaimana transformasi digital dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan nilai-nilai lokal, menciptakan bentuk pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah Baru Pendidikan Politik Lokal: Pemuda sebagai Simpul Demokrasi Akar Rumput

Dalam lanskap demokrasi lokal yang terus bertransformasi, pemuda muncul sebagai simpul penting yang menghubungkan aspirasi masyarakat akar rumput dengan dinamika politik yang lebih luas. Peran ini bukan terbentuk secara instan, melainkan tumbuh seiring kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan aktif dalam ruang-ruang politik yang sebelumnya cenderung elitis dan tertutup. Di Desa Waemulang, misalnya, pemuda tidak hanya menjadi pengamat pasif proses politik, melainkan penggerak yang memfasilitasi dialog antarwarga, menyebarkan informasi pemilu, serta menjadi jembatan komunikasi antara generasi tua dan muda melalui bahasa dan media yang kontekstual.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa simpul demokrasi ini terbentuk secara organik melalui aktivitas keseharian yang sarat makna politis, meski tidak selalu dalam bentuk formal. Salah satu contoh konkret adalah kegiatan "Ronda Demokrasi" yang dilaksanakan setiap malam Jumat oleh sekelompok pemuda, yang terdiri dari diskusi santai tentang isu pembangunan desa dan evaluasi kinerja kepala desa. Informasi dari salah satu informan, AN (25), menyebutkan bahwa kegiatan ini awalnya hanya diskusi ringan di pos ronda, namun kemudian berkembang menjadi ruang deliberatif yang konsisten diikuti warga. Mereka merasa lebih didengar ketika berbicara di ruang informal ini daripada dalam forum resmi seperti musyawarah desa.

Keterlibatan pemuda dalam ruang-ruang informal ini juga sangat dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang lentur dan adaptif. Pemuda memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan pengaruhnya tanpa menghilangkan aspek kultural dari komunikasi

lokal. Sebagai contoh, informasi hasil diskusi “Ronda Demokrasi” diolah menjadi infografis sederhana dan disebarakan melalui status WhatsApp serta laman Facebook komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak harus kaku dan formal, tetapi bisa dibentuk melalui narasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan teori *networked young citizens*, yaitu pemuda yang aktif secara politis melalui jaringan digital yang terhubung dengan praktik sosial mereka (Hudaeva & Pratama, 2023; Nobuhiro, 2023; Susila et al., 2020).

Namun, penguatan peran pemuda sebagai simpul demokrasi lokal tidak akan efektif tanpa dukungan kebijakan publik yang responsif. Selama ini, inisiatif-inisiatif pemuda seringkali berjalan secara swadaya dan tidak mendapat pengakuan formal dari pemerintah desa maupun kabupaten. Padahal, dukungan dalam bentuk pelatihan literasi politik, penguatan kapasitas digital, hingga fasilitasi ruang pertemuan dapat memperbesar dampak inisiatif mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Tresiana et al. (2023) dalam kerangka *empowered participatory governance*, partisipasi warga yang efektif membutuhkan struktur kelembagaan yang mendukung, bukan sekadar kerelaan individu untuk terlibat.

Salah satu informan lainnya, LS (23), menyampaikan bahwa “anak-anak muda seringkali merasa energinya tidak dianggap,” padahal mereka punya ide dan semangat tinggi untuk membangun desa. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana kebutuhan akan pengakuan formal menjadi aspek penting dalam memperkuat peran pemuda dalam pembangunan politik lokal. Ketika keberadaan mereka hanya dipandang sebagai pelengkap atau sekadar pelaksana teknis, maka potensi inovatif dan reflektif mereka tidak akan berkembang optimal.

Arah baru pendidikan politik lokal yang berbasis pada peran pemuda tidak hanya soal memperluas akses informasi politik, tetapi juga soal penciptaan struktur sosial baru yang lebih partisipatif, reflektif, dan responsif terhadap dinamika lokal. Di sinilah pemuda mengambil posisi strategis sebagai agen perubahan—bukan karena kedekatan mereka dengan teknologi saja, tetapi karena kemampuan mereka membentuk jejaring sosial yang lentur, menjembatani nilai lama dan semangat baru dalam demokrasi.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah wacana pendidikan politik yang selama ini cenderung mengabaikan konteks desa dan agen pemuda sebagai aktor utama. Dengan merujuk pada perspektif *civic agency* yang dikembangkan oleh Boyte (2008), dapat dikatakan bahwa pemuda di desa seperti Waemulang bukan hanya peserta demokrasi, melainkan juga *co-creators* yang aktif membentuk makna dan praktik demokrasi dari bawah ke atas. Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan publik diarahkan untuk tidak hanya mengedukasi pemuda, tetapi juga membuka ruang partisipatif yang memberi mereka pengaruh nyata dalam proses pembangunan politik lokal.

SIMPULAN

Dalam kajian ini, ditemukan bahwa pemuda di Desa Waemulang memainkan peran krusial dalam menggerakkan pendidikan politik di tingkat lokal, melalui perpaduan pendekatan digital dan tradisional yang adaptif terhadap konteks sosial budaya mereka. Pemuda, yang sebelumnya dianggap hanya sebagai bagian dari generasi muda yang pasif

dalam politik, kini tampil sebagai agen perubahan yang aktif, baik sebagai penyampai informasi politik maupun fasilitator diskusi yang merangsang partisipasi politik. Mereka memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk mengedukasi pemilih pemula, sekaligus mempertahankan metode tradisional seperti diskusi terbuka dan ronda desa sebagai wadah untuk berbagi informasi politik yang relevan. Model pendidikan politik yang mereka kembangkan bukan hanya mencerminkan keterbukaan terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga menunjukkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai lokal dalam menyampaikan pesan-pesan politik.

Namun, meskipun pemuda telah berhasil mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pendidikan politik, sejumlah tantangan masih mengemuka. Rendahnya literasi digital di kalangan sebagian besar pemilih pemula serta minimnya minat terhadap isu-isu politik menjadi hambatan signifikan dalam memperluas cakupan dan efektivitas komunikasi politik. Persepsi bahwa politik adalah wilayah elit yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa juga masih cukup kuat, meski dalam praktiknya pemuda berhasil menjembatani kesenjangan ini dengan pendekatan yang lebih naratif dan kontekstual.

Penelitian ini menegaskan bahwa untuk memaksimalkan potensi pemuda dalam demokrasi lokal, dibutuhkan dukungan yang lebih kuat dari kebijakan publik, yang tidak hanya mengakui peran mereka tetapi juga menyediakan pelatihan literasi digital dan platform untuk pengembangan kapasitas politik. Di sini, pemuda tidak hanya diharapkan menjadi peserta aktif dalam sistem demokrasi, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat desa. Ke depan, integrasi pendidikan politik berbasis komunitas yang memperkuat sinergi antara teknologi digital dan pendekatan tradisional diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik yang lebih mendalam di kalangan pemuda, serta mendorong terjadinya transformasi demokrasi yang lebih nyata dan berkelanjutan di masyarakat pedesaan. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian pendidikan politik dan demokrasi lokal, dengan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pemuda di Indonesia dapat berperan sebagai simpul utama dalam jaringan demokrasi akar rumput yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R., & Sofyan, N. (2023). To What Extent Political Education Can Influence Young Voters' Perceptions? *Journal of Government and Civil Society*, 7(1), 119–139.
- Alami, A. N., Luong, D. N. A., Prihatini, E., Ramadhani, E., Go, J. R. R., Hafidzah, N., & Atiyah, U. (2022). Democratization in the digital era: Experience from Southeast Asia. *Journal of ASEAN Studies*, 10(2), 227–246.
- Amin, F., Swarizona, S., Kuncahyo, T., Arafat, Y., & Oktarina, R. A. (2023). Digital Democracy Political Participation Through Technology in the Modern Era. *International Journal of Science and Society*, 5(4), 291–301.
- Anoraga, B. (2020). *New Media and Social Engagement: The Promotion of Civic Pluralism in Contemporary Indonesia*. University of New South Wales (Australia).

- Anoraga, B., & Sakai, M. (2023). From pemuda to remaja: Millennials reproducing civic nationalism in post-New Order Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 51(150), 209–230.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317.
- Beta, A. R. (2020). Politics of youth survival in times of crisis. *Inter-Asia Cultural Studies*, 21(4), 484–494.
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 14.
- Chakim, S. (2022). The youth and the internet: The construction of doctrine, Islam in practice, and political identity in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 13(1), 217–236.
- Christawan, E., Perwita, A. A. B., Midhio, I. W., Hendra, A., & Risman, H. (2023). Journal of Social and Political Sciences. *Journal of Social and Political Sciences*, 6(2), 98–124.
- Christou, P. A. (2022). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism*, 3(2), 79–95.
- Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. R. (2019). Two decades of reformasi in Indonesia: its illiberal turn. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 691–712.
- Hendren, K., Newcomer, K., Pandey, S. K., Smith, M., & Sumner, N. (2023). How qualitative research methods can be leveraged to strengthen mixed methods research in public policy and public administration? *Public Administration Review*, 83(3), 468–485.
- Herdiansah, A. G. (2019). Political Participation Convergence in Indonesia: A Study of Partisan Volunteers in the 2019 Election. *Jurnal Politik*, 4(2), 16.
- Herdiansah, A. G., Sumadinata, W. S., Padjajaran, U., & Padjajaran, U. (2019). Indonesia's political culture in the new digital age: A preliminary discussion Budaya politik Indonesia di era digital baru: Suatu diskusi pendahuluan. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(4), 378–389.
- Hudaeva, E., & Pratama, H. S. (2023). The Identity Project of Young Candidates in The Indonesia 2019 Election. *Fourth Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Arts and Humanities Stream (AHS-APRISH 2019)*, 158–174.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42.
- Kolopakings, L. M., Wahyono, E., Irmayani, N. R., Habibullah, H., & Erwinsyah, R. G. (2022). Re-Adaptation of COVID-19 Impact for Sustainable Improvement of Indonesian Villages' Social Resilience in the Digital Era. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(7).
- Kusmulyono, M. S. (2023). Collaborative youth action to alleviate digital inequality in rural areas in Indonesia. *Sustainable Development and the Digital Economy: Human-Centricity, Sustainability and Resilience in Asia*, 81.
- Kwan, J. Y. (2022). 'Democracy and active citizenship are not just about the elections': Youth civic and political participation during and beyond Singapore's nine-day pandemic election (GE2020). *Young*, 30(3), 247–264.
- Lester, J. N., Cho, Y., & Lochmiller, C. R. (2020). Learning to do qualitative data analysis: A starting point. *Human Resource Development Review*, 19(1), 94–106.
- Mashud, M., Ida, R., & Saud, M. (2023). Political discussions lead to political efficacy among

- students in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 184–200.
- Nobuhiro, A. (2023). Bringing the Young and the Tech into Indonesia's Digital Education Politics and the Geopolitical Impact. *Asia-Pacific Review*, 30(2), 66–91.
- Power, T., & Warburton, E. (2020). The decline of Indonesian democracy. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression*, 1–20.
- Priambodo, B. (2023). Political Marketing Towards the 2024 Local Elections in the Frame of Digital Democracy. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 4(1), 19–24.
- Reyes, V., Bogumil, E., & Welch, L. E. (2024). The living codebook: Documenting the process of qualitative data analysis. *Sociological Methods & Research*, 53(1), 89–120.
- Ridder, H.-G. (2018). *Book Review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (6th ed., Vol. 28, Issue 4). Sage publications.
- Riddle, S. (2019). Democracy and education in contemporary local-global contexts. *International Education Journal: Comparative Perspectives*, 18(1), 1–6.
- Rosser, A., King, P., & Widoyoko, D. (2021). The political economy of the learning crisis in Indonesia. *RISE Annual Conference, University of Oxford*, 22–24.
- Roza, P., Saepudin, E., & Adhitama, G. P. (2023). Youth Political Participation in The Digital Age: Preparing A New Society of Good and Smart Digital Citizens. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 6, 1049–1059.
- Rozaki, A. (2022). From political clientelism to participatory democracy. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 1–16.
- Sastramidjaja, Y. (2019). Youth "Alienation" and new radical politics: Shifting trajectories in youth activism. *Continuity and Change after Indonesia's Reforms: Contributions to an Ongoing Assessment*, 238–262.
- Saud, M. (2020). Civic engagement, youth socialisation and participation in public spheres in Indonesia. *Children and Youth Services Review*, 119, 105669.
- Sayrani, L. P., PANDIE, D. B. W., & NEOLAKA, M. N. B. C. (2023). Youth Citizenship: Connected and Unconnected in Public Issues. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(3), 731–743.
- Siregar, I. (2023). Harmonizing Modern and Indigenous Democracy: An Exploration of Traditional Democratic Values in Ethnic Communities of Indonesia. *Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture*, 4(2), 91–101.
- Susila, I., Dean, D., Yusof, R. N. R., Setyawan, A. A., & Wajdi, F. (2020). Symbolic political communication, and trust: a young voters' perspective of the Indonesian presidential election. In *Political Branding* (pp. 148–170). Routledge.
- Suwana, F. (2021). Content, changers, community and collaboration: Expanding digital media literacy initiatives. *Media Practice and Education*, 22(2), 153–170.
- Tresiana, N., Duadji, N., & Damayantie, A. (2023). Deliberative Democracy Innovations at Citizen Level: Challenges of Local Government in Indonesia. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 21(4).